

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan seluruh sektor untuk menuju Indonesia yang lebih baik, dengan fokus tujuan (a) mengejar peningkatan daya saing, (b) meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental, (c) memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan, (d) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, (e) mengurangi ketimpangan antarwilayah, (f) memulihkan kerusakan lingkungan, dan (g) memajukan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah telah mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep membangun Indonesia dari pinggir. Pada fokus kelima dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia memberikan fokusnya pada pengurangan ketimpangan antar wilayah, yang berarti pemerintah memberikan fokus pada kawasan perbatasan dengan pengembangan perdesaan. Pada pembangunan perdesaan arah kebijakan pemerintah meliputi (1) pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengan kondisi geografis desa, (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, (3) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, (4) penguatan pemerintahan desa, (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan, dan (6) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa kota. Sedangkan pengembangan

kawasan perbatasan, dengan arah kebijakan: (1) penguatan pelayanan imigrasi dan penegasan batas wilayah negara, dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan perdesaan menjadi fokus untuk membangun negara Indonesia dari pinggiran, atau pelosok (Anon., 2014).

Pembangunan dengan konsep pinggiran yang berfokus pada pengembangan perdesaan dikuatkan dengan disahkannya UU tentang Desa, yang didukung PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bab IV pasal 18 pada UU Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan yang meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Perubahan paradigma pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semula tumpang tindih secara kelembagaan sekarang menjadi lebih terkonsolidasi. Perubahan pada paradigma ini membutuhkan dukungan sistem informasi desa. Sistem informasi dibangun sesuai dengan visi dan misi dari organisasi agar sistem informasi dapat menjadi alat yang efektif. Perubahan paradigma pembangunan desa membuat sistem informasi desa menjadi kian penting peranannya, sehingga perlu dikembangkan sistem informasi desa yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan desa (Anon., 2014).

Sistem informasi desa telah muncul dalam UU Desa, yaitu pada pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan

Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Data dan informasi yang telah tercapture dengan baik dan akurat harus menjadi dasar perencanaan pembangunan pada skala menengah dan panjang.

Pengumpulan data dan informasi yang semula membutuhkan waktu yang lama pada desa dan kabupaten, kini menjadi lebih cepat dan akurat. Pengumpulan data yang lama disebabkan oleh banyaknya data yang harus diolah. Pengolahan data yang banyak dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Hasil yang tidak akurat membuat rancangan anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sistem informasi membuat pengolahan data menjadi lebih efisien, efektif dan hasil yang dihasilkan lebih akurat.

Sistem informasi ini nantinya dapat melihat dan menginputkan data rencana pembangunan desa pada suatu desa tertentu dengan periode tertentu. Serta penginputan data-data master yang terkait untuk rencana pembangunan daerah dan anggaran pembangunan daerah, misalnya seperti kode rekening, taun anggaran, periode. Sistem ini juga nantinya dapat melihat dan menginputkan anggaran untuk rencana yang telah kita rencanakan sebelumnya. Sistem informasi ini pada saat penginputan data anggaran pembangunan secara otomatis akan terlihat anggaran yang tersedia pada desa tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu untuk membuat sistem informasi yang dapat mengetahui secara real time dan akurat. Rencana apa saja yang akan dilaksanakan, yang telah terlaksana ataupun sedang terlaksana pada desa tersebut. Diharapkan nantinya sistem informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan informasi secara

cepat, dan juga untuk membuat keputusan baik yang bersifat strategis dan taktikal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi supra desa pada level kabupaten?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi supra desa pada level kabupaten?

1.3 Batasan Masalah

Penyusunan tugas akhir ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Sistem informasi supra desa akan dibangun menjadi aplikasi website di tingkat kabupaten.
2. Sistem Informasi yang akan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP.
3. Sistem Informasi ini menggunakan CodeIgniter sebagai framework dari bahasa pemograman PHP.
4. Data yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi ini merupakan data rekaan dimana struktur basis datanya diambil dari basis data SIDEKa.
5. Hasil pembangunan sistem informasi hanya terbatas pada perencanaan perancangan anggaran desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi supra desa yang dapat digunakan untuk merancang anggaran pada kabupaten desa sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Mengimplementasikan Sistem Informasi supra desa yang dapat digunakan untuk merancang anggaran pada level kabupaten sebagai dasar pengambilan keputusan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari pembangunan aplikasi ini adalah membantu dalam pesebaran informasi dari Desa kepada masyarakat, melalui statistik desa dan informasi tentang desa. Dari sisi pengolah data, dapat membantu dalam pencatatan data informasi penduduk dan dapat merancang Rencana Anggaran Belanja Desa (RABDes).

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai pembangunan pembuatan sistem informasi untuk perdesaan.

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisis dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan dari sistem informasi. Analisis dilakukan dengan analisis dokumen dan

data dari *stakeholder*. Hasil analisis tersebut didokumentasikan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

3. Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan dilakukan dalam empat bagian, yaitu perancangan arsitektur, perancangan data, perancangan antarmuka, dan perancangan kelas. Hasil perancangan didokumentasikan dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).

4. Pengkodean Perangkat Lunak

Pengkodean dilakukan untuk mengubah hasil rancangan ke dalam kode program.

5. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian dilakukan untuk menguji Sistem apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil pengujian tersebut didokumentasikan dalam dokumen Perancangan Deskripsi dan Hasil Uji Perangkat Lunak (PDHUPL).

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir disusun dalam enam bab yang meliputi : Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Analisis dan Perancangan Sistem, Implementasi dan Pengujian, serta Kesimpulan dan Saran.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian atau analisis terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditinjau dalam tugas akhir.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini berisi dasar uraian dasar teori yang akan digunakan dalam melakukan perancangan dan pembuatan program.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibuat, serta desain sistem yang akan diterapkan.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai implementasi dan pengujian perangkat lunak yang sesuai dengan

garis besar yang telah digariskan pada analisis dan desain sistem sebelumnya, sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan awal.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tugas akhir secara keseluruhan dan saran untuk pengembang lebih lanjut.

